



**SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG )**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**SRI WINARTI**

**B4B007192**

**PEMBIMBING :**

**H. Mulyadi, S.H., M.S**

**Yunanto, S.H., M. Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2009**



**SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG )**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**SRI WINARTI**

**B4B007192**

**PEMBIMBING :**

**H. Mulyadi, S.H., M.S**

**Yunanto, S.H., M. Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2009**

**© Sri Winarti 2009**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan taufik, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tesis dengan judul :

**SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 199/Pdt.G/2005/PN. SMG )**

Penulis menyadari bahwa tesis ini berhasil disusun tidak terlepas tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menghaturkankan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. H. Kashadi, S.H. M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji tesis dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
3. Dr. Budi Santoso, S.H, MS, selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
4. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

5. H. Mulyadi, S.H. M.S, selaku Pembimbing I & Anggota Tim Penguji tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Yunanto, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II & Anggota Tim Penguji tesis yang telah memeriksa, memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Sonhaji S.H, M.Hum, selaku dosen wali penulis yang telah banyak membantu dalam perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bambang Eko Tursino, S.H, M.Hum, selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum, selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
10. A. Kusbiyandono, S.H, M.Hum, selaku Dosen dan Reviewer Proposal Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
11. Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum selaku Hakim Pembimbing yang telah memeriksa, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
12. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya dalam mengadakan riset pada Pengadilan Negeri Semarang, yaitu Bp. Sindu

Sutrisno S.H, M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang serta Hakim-Hakim lainnya : Bp. Silalahi, Bp. Kurnia, Bp. Sembiring, Bp. Tigor, Bp. Charles, Bp.Sucipto, dan Ibu Lidya.

13. Sri Sunarti, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
14. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
15. Bapak/Ibu Tata Usaha yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
16. Bapak/Ibu Staff Perpustakaan Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam peminjaman buku-buku kepada penulis.
17. Papa, Mama, dan seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan doa, dan dukungan, dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
18. Seseorang yang selalu dengan setia memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang dan cintanya kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
19. Mayor Inf Soetoyo, Dr. Himawan & Rr. Arumdati Pratiwi, S.H, MKn yang telah banyak membantu penulis dari awal masuk perkuliahan hingga penulis

menyelesaikan kuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

20. Keluarga Besar MAHMIL & ODMIL II-10 Semarang yang telah memberikan doa, dan dukungan, dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

21. Bp. Us Madu Hargo, Ladju Kusmawardani, S.H., Winardi, BcHK, Yulina, Vivi, Arum, Lely, Nunung, Fizha, Fika, Iza, dan seluruh teman-teman Angkatan 2007 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari pembaca agar tesis ini menjadi sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 16 Maret 2009

yang menyatakan

( Sri Winarti, S.H. )

**SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 199/Pdt.G/2005/PN. SMG )**

**TESIS**

Oleh :

**SRI WINARTI, S.H.**

**B4B007192**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal : 16 Maret 2009

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**Menyetujui**

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

**H. Mulyadi, S.H., M.S**  
**NIP. 130 529 419**

**Yunanto, S.H., M. Hum**  
**NIP. 131 689 627**

Ketua Program

**H. Kashadi, S.H, M.H.**  
**NIP. 131 124 438**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Winarti S.H.

Nim : B4B007192

Fakultas : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya dari orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan khususnya Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai Sita Marital adalah bebar-benar dari hasil penelitian penulis sendiri yang belum pernah/diteliti oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka dalam tulisan ini.

Semarang, 16 Maret 2009

yang menyatakan

( Sri Winarti, S.H. )



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**ABSTRAKSI**  
**Sita Marital Terhadap Harta Bersama**  
**Dalam Perkawinan Karena Perceraian**  
**Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**  
**(Studi Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG)**

Sita marital (marital beslag) merupakan bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama antara suami istri, apabila terjadi sengketa perceraian/pembagian harta bersama. Sita marital tidak banyak diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dan tidak secara jelas disebut sita marital, hanya saja mengandung makna yang sama dengan sita marital, yaitu dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975. Demikian pula dalam HIR/RBG juga tidak mengatur tentang sita marital, karena sita marital lebih banyak diatur dalam ketentuan Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63).

Pada putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dalam perkara perceraian, permohonan sita maritalnya telah dikabulkan, dan dalam amar putusannya telah dinyatakan sah dan berharga sita maritalnya. Sedangkan diketahui bahwa tujuan sita marital itu untuk menyimpan atau membekukan harta bersama, tetapi apabila sita marital tersebut dikabulkan dinyatakan sah dan berharga, maka apabila perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dapat meningkat/bertambah menjadi sita eksekutorial (memperoleh sita eksekutorial), oleh karena itu hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan sita marital itu sendiri, dan menurut ketentuan Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku serta sita marital yang telah dikabulkan dalam gugatan perceraian yang dalam amar putusannya dinyatakan sah dan berharga dalam putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga).

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang mana lebih ditekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori ilmu hukum. Tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ditemukan suatu azas-azas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa walaupun sudah ada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi permasalahan mengenai sita marital yang sangat diperlukan dalam penyelesaian harta bersama yang hanya diatur dalam 1 pasal saja, akan tetapi pelaksanaan sita marital itu sendiri masih menggunakan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang lama yaitu HIR, sedangkan lembaga sita marital itu sendiri banyak diatur dalam ketentuan Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63).

Kata kunci : Sita Marital (Marital Beslag)

**ABSTRACT**  
**Marital Seizure On The Joint Property**  
**In A Marriage Caused By A Divorce**  
**According To Act No.1 Year 1974 Concerning Marriage**  
**(A Case Study Of Verdict No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG)**

Marital seizure (marital beslag) is a type of specific seizure applied to the collective assets between a husband and a wife if there is any marital dispute/joint property division. Marital seizure is not mostly regulated in the Marriage Act and it is not clearly mentioned as marital seizure; it only has the same meaning as marital seizure, which is written in Article 24 verse (2) letter c of the Government Ordinance No. 9 Year 1975. The same thing also happens in the Civil Procedural Law (HIR/RBG), which also does not regulate marital seizure because marital seizure is mostly regulated in the terms of Civil Procedural Code Regulation/RV (Reglement Op De Rechtvordering Government Gazette 1847 No. 52 in connection with Government Gazette 1849 No. 63).

In the Verdict No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG of a divorce case, the request for its marital seizure has been granted, and in its verdict injunction, the marital seizure has been declared as legal and worthy. Meanwhile, it is learned that the objective of marital seizure is to store or freeze the joint property; however if the marital seizure is granted and declared as legal and worthy, in which, if the case has had a permanent legal force, it can rise/enhance into an executorial seizure (obtains executorial seizure). This is, therefore, against the objective of marital seizure itself, and according to the terms of Civil Procedural Code Regulation/RV (Reglement Op De Rechtvordering Government Gazette 1847 No. 52 in connection with Government Gazette 1849 No. 63).

This research has the objectives of finding out how the procedure of the execution of marital seizure on the joint property granted through the Verdict No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG is, and what the solutions taken if the granted marital seizure in a divorce claim has been declared as legal and worthy in its verdict injunction, in the Verdict No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG, which has had a legal force; however, the division of joint property cannot be executed by the parties; can the marital seizure that has been declared as legal and worthy be enhanced into an executorial seizure (because it has been declared as legal and worthy)?

In this research, the utilized research method is the juridical-normative method, which is a method of approach emphasizing more on the sources of secondary materials, both in form of law and order and theories of law studies. However, besides that, it also examines the legal principles prevailing in the society; thus, legal principles in form of dogma or law doctrine are discovered.

From the results of this research, it can be found that although there has been Act No. 1 Year 1974 concerning Marriage, the problems of marital seizure highly required in the resolution of joint property resolution is only regulated in one article. However, the execution of marital seizure still uses the principles of the old Civil Procedural Law, which is HIR; meanwhile the marital seizure institution is mostly regulated in the terms of Civil Procedural Code Regulation/RV (Reglement Op De Rechtvordering Government Gazette 1847 No. 52 in connection with Government Gazette 1849 No. 63).

**Keywords:** marital seizure (marital beslag)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Pernyataan .....	vii
Motto dan Persembahan .....	viii
Abstraksi .....	xi
Abstract .....	x
Daftar Isi .....	xi
 Bab I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
 Bab II    TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	18
1. Pengertian, Arti, dan Tujuan Perkawinan .....	18
2. Sahnya Perkawinan .....	20
3. Syarat-syarat Perkawinan .....	21
4. Larangan-larangan Perkawinan .....	29
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	32
1. Pengertian Perceraian .....	32
2. Alasan-alasan Perceraian .....	33

3. Akibat Perceraian .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Sita .....	42
1. Pengertian, Arti dan Tujuan Sita .....	42
2. Macam dan Prosedur Sita .....	43
D. Sita Marital .....	58
1. Pengertian Sita dan Tujuan Sita .....	58
2. Pengaturan Sita Marital .....	60
3. Lingkup Penerapan Sita Marital .....	62

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku .....	67
1. Duduk Perkaranya .....	67
2. Jawaban Tergugat .....	70
3. Pembuktian .....	76
4. Bukti Yang Diajukan Tergugat .....	78
5. Pemeriksaan Setempat .....	78
6. Pertimbangan Hukum Hakim .....	79
7. Analisis Kasus .....	85
B. Sita marital yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan No.199/Pdt.G/2005PN.SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga) .....	90

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	98
B. Saran .....	101

DAFTAR PUSTAKA .....	103
----------------------	-----

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.<sup>1</sup>

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1) Kematian

---

<sup>1</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 6

## 2) Perceraian

### 3) Atas keputusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat.<sup>2</sup> Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat, adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dan bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Kemudian hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil.

Putusan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap :<sup>3</sup>

- 1) Orang tua / anak
- 2) Harta benda perkawinan

### **1.1. Orang tua / anak**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 UU

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah :

---

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal.38.

<sup>3</sup> Ibid, Hal 34 -35



- a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Mengenai kedudukan anak, apabila anak sudah dewasa dapat mengikuti ayahnya dan apabila anak belum dewasa mengikuti ibunya. Apabila anak-anak sudah menjadi dewasa, keputusan diserahkan kepada mereka hendak mengikuti ayah atau ibunya. Dalam melakukan pembagian harta benda perkawinan harus memperhatikan kepentingan anak dan kepada siapa akan diserahkan tentang pemeliharaan, dan pendidikan anak.

Mengenai status suami istri yang telah bercerai menjadi duda atau janda, dapat melakukan perkawinan kembali dengan orang lain, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **2.1. Harta benda perkawinan**

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan, menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain(Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta bawaan suami atau istri kembali kepada para pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya(Pasal 36 ayat (1) dan (2) UUP). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata(Penjelasan Pasal 37 UUP).

Para pencari keadilan (justiabelen), tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan. Untuk menjamin hak-hak pencari keadilan tersebut maka hukum memberi jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang-

barang sengketa atau yang dijadikan jaminan. Didalam praktek dikenal ada 4 (empat) macam sita yaitu :

1. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
2. Sita Hak Milik (Rivindcatoir Beslag)
3. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)
4. Sita Eksekusi (Executoir Beslag)

Setiap sita mempunyai tujuan tertentu (berbeda-beda) namun tujuan akhir daripada sita tidak lain untuk menjamin agar :

- a. putusan Hakim secara nyata dapat diwujudkan
- b. putusan Hakim tidak hampa karena barang sengketa telah tiada/dipindahtangankan.

Apabila terjadi sengketa perceraian di Pengadilan untuk pembagian harta bersama perkawinan terdapat bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-istri yang disebut dengan *sita marital*.<sup>4</sup> Perkataan marital tetap seperti istilah aslinya dalam bahasa Belanda, tidak diIndonesiakan. Istilah sita marital berasal dari *marital beslag* yang disebut juga dengan *sita matrimonial (matrimonial beslag)*, bahkan pada saat ini dalam perkembangan hukum Belanda lebih populer dengan sebutan *matrimonial beslag*, karena mengandung makna kesetaraan antara suami istri dalam perkawinan. Sedang istilah *sita marital* mengandung konotasi yang menempatkan istri dibawah kekuasaan suami dalam perkawinan, yang dikenal dengan lembaga *matriale macht* sebagaimana selama ini digariskan dalam Pasal 105 dan 106 KUH Perdata, yang menegaskan :

---

4 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.57.

❖ Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri :

- memberi bantuan kepada istri dimuka pengadilan, dan
- mengemudikan harta milik pribadi istri

❖ Setiap istri harus tunduk-patuh kepada suami (Pasal 106 KUH Perdata)

Demikian kesan diskriminatif yang terkandung dalam perkataan sita marital, dan dianggap layak untuk menggantinya dengan istilah sita matrimonial.

Dalam sistem hukum di Indonesia dapat dipergunakan istilah sita harta bersama, sebutan ini memperlihatkan kedudukan yang setara (equal) antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan itu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Bahkan pada ayat (2) ditegaskan lagi, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehubungan dengan hal ini beralasan kiranya dipergunakan istilah tersebut tanpa mengurangi kemungkinan penggunaan istilah sita marital.

Khususnya mengenai sita marital yang dimohonkan dalam gugatan perceraian, setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, diatur sangat terbatas sekali yaitu hanya diatur dalam pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Dalam Putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang menyatakan sah secara hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut hukum bahwa

Perkawinan Penggugat Henny Suharningsih alias Henny Suhaeningsih binti Mumuh alias E. Mumuh dan Tergugat Tatang Hasan Permana alias T. Hasan Permana alias Tjia Sen Peng bin Tjia Min Tjhon alias Amin, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menyatakan menurut hukum bahwa sita marital atas harta bersama baik yang berada di Semarang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.199/Pdt.G/2005/PN.Smg jo Berita Acara Sita Marital Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 9 Januari 2006 dan di Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.120/Pdt.Eks/HT/2006.PN.Bdg tanggal 23 Februari 2006 jo Berita Acara Sita Marital Pengadilan Negeri Bandung No.114/Pdt/DEL/2006/PN.Bdg tertanggal 1 Maret 2006 adalah sah dan berharga.

Dalam kasus gugatan perceraian perkara perdata putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 April 2006 telah mengabulkan permohonan sita maritalnya. Seperti diketahui bahwa sita itu sendiri masing-masing mempunyai tujuan tertentu, khususnya dalam kasus perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bertujuan untuk membekukan/menjamin agar barang yang disita berupa harta bersama tidak dipindahtangankan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b dan PP No.9 tahun 1975 beserta penjelasannya, sita marital berfungsi untuk melindungi hak pemohon sita (baik penggugat/tergugat) selama pemeriksaan sengketa perceraian di

Pengadilan berlangsung dengan menyimpan/membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai dipindahtangankan kepada pihak ke-3.

Oleh karena sifatnya hanya menyimpan/membekukan maka apakah sita marital itu apabila dikabulkan dalam gugatannya perlu dinyatakan sah dan berharga/tidak, dalam amar putusannya, sebab seperti diketahui dalam kasus putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dalam amar putusannya dikabulkan sita maritalnya dinyatakan sah dan berharga. Namun demikian putusan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan adanya sita eksekutorial.

Pada azasnya dalam penyitaan apabila permohonan sita marital itu dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusannya maka pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh title eksekutorial yang mengubah sita marital menjadi sita eksekutorial. Sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan peyerahan/penjualan barang yang disita.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul “Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.199/Pdt.G/2005/PN. Semarang)“.

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana diketahui bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, yaitu terhadap orang tua/anak dan terhadap harta benda perkawinan. Dalam suatu

perkawinan, harta benda merupakan sarana untuk melangsungkan hidup serta untuk menambah kebahagiaan dalam keluarga (rumah tangga). Namun jika terjadi perceraian, maka akan timbul perselisihan antara suami istri, karena pembagian harta benda yang tidak adil antara yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana sita marital yang telah dikabulkan dalam gugatan perceraian yang dalam amar putusannya dinyatakan sah dan berharga dalam putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bahwa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam mengadakan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

2. Untuk mengetahui sita marital yang telah dikabulkan dalam gugatan perceraian yang dalam amar putusannya dinyatakan sah dan berharga dalam putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan dalam bidang harta benda perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, mengenai pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku serta bagaimana sita marital yang telah dikabulkan dalam gugatan perceraian yang dalam amar putusannya dinyatakan sah dan berharga dalam putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG yang sudah berkekuatan



hukum tetap tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga).

## **E. Metode Penelitian**

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum, adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup>

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberikan arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>6</sup>

Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 43

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1987, hlm. 8.

maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran serta data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.<sup>7</sup> Sehingga dapat diambil data obyektif, yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang permasalahan yang ada, mengenai pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku serta apabila sita marital yang telah dikabulkan dalam gugatan perceraian yang dalam amar putusannya dinyatakan sah dan berharga dalam putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 10.

bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga).

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan lapangan.

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- a) RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63);
- b) HIR;
- c) R.Bg (Rechtsreglement Buitensewesten);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- e) Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) buku-buku mengenai Hukum Acara Perdata;
- b) hasil-hasil penelitian (hukum);
- c) hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus Inggris-Indonesia;
- b) Kamus Hukum Belanda-Indonesia;
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **b. Penelitian Lapangan**

Di dalam penelitian lapangan ini meliputi:

- 1) Lokasi penelitian: Pengadilan Negeri Semarang.
- 2) Responden : - Tiga (3) Hakim Pengadilan Negeri Semarang,  
- Dua (2) Pengacara
- 3) Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, data yang diperoleh menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah

pedoman terstruktur, yakni pedoman tersebut disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal terlewat. Pedoman ini oleh peneliti nantinya akan digunakan dalam melakukan wawancara, untuk menggali pendapat dari beberapa responden, sehingga diperoleh data yang akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk tesis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu terdiri atas :

**BAB I** : PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : TINJAUAN PUSTAKA, berisi tinjauan umum tentang :

- Perkawinan meliputi Pengertian, Arti, dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan-

larangan Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan;

- Perceraian meliputi Pengertian Perceraian, Alasan-alasan Perceraian, Akibat Perceraian.
- Sita meliputi Pengertian Sita dan Tujuan Sita, Macam dan Prosedur Sita
- Sita Marital meliputi Pengertian, Arti, dan Tujuan Sita Marital, Pengaturan Sita Marital, Lingkup Penerapan Sita Marital.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No. 199/Pdt.G/2005PN. SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku serta sita marital yang telah dinyatakan sah dan berharga yang dalam amar putusan No.199/Pdt.G/2005PN. SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga).

**BAB V : PENUTUP** berisi tentang Kesimpulan dan Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian, Arti dan Tujuan Perkawinan**

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.*

Arti dari sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan unsur-unsur perkawinan, yaitu : <sup>8</sup>

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat (hubungan formal), yaitu mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hal ini dapat dilihat karena dibentuk oleh undang-undang, hubungan mana mengikat bagi kedua belah pihak dan pihak lain atau masyarakat. Ikatan batin ialah ikatan

---

<sup>8</sup> K. Wantjik Saleh, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal.14-15

yang tidak dapat dilihat (hubungan tidak formal), yang diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, yang akan menimbulkan kerukunan dan mengikat kedua belah pihak. Terjalannya ikatan lahir batin tersebut, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

- b. Adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri mengandung arti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami tidak diperbolehkan untuk kawin lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini mengandung asas monogami. Dalam keadaan tertentu asas monogami dapat dikesampingkan, akan tetapi diperbolehkan bagi mereka yang yang diperkenankan oleh agama dan undang-undang untuk menikah lagi dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini dapat diartikan, bahwa mereka itu haruslah berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan. Perceraian karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan perkawinan karena perceraian (cerai hidup), merupakan jalan akhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.
- d. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa perkawinan itu tidak begitu saja menurut kemauan pihak-pihak,



melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia, sebagai makhluk yang beradab.

## **2. Sahnya Perkawinan**

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang akan berhubungan dengan sahnya perkawinan tersebut. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka akibat hukumnya perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sahnya suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Tujuan pencatatan perkawinan, adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi pihak suami istri, maupun pihak lain atau masyarakat, dan sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan namun hanya bersifat administratif, yaitu yang menyatakan bahwa perkawinan itu memang ada dan benar terjadi.<sup>10</sup>

### **3. Syarat-Syarat Perkawinan**

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : <sup>11</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini tidak cukup diperoleh dari kedua orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 16 - 17

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 40

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang akan memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

berlaku juga dalam hal permintaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Terdapat 2 (dua) syarat perkawinan yaitu :

1. Syarat Material (subyektif) yaitu syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari : <sup>12</sup>
  - a. Persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun, wanita berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
  - b. Izin orang tua atau Pengadilan jika belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
  - c. Tidak terikat dalam suatu perkawinan;

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (syarat-syarat perkawinan poligami) yaitu :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya;

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citara Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 76.

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini (Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Bagi janda yang sudah lewat waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menentukan masa tunggu sebagai berikut :

- 1) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3X (tiga kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi wanita yang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada masa tunggu.
- 2) Apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

f. Tidak Ada Larangan Perkawinan;

Larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antar dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, kebawah, menyamping, hubungan semenda, sesusuan, iparan, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

g. Sudah memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 (sepuluh) hari sebelum dilangsungkan perkawinan;

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

h. Tidak Ada Yang Mengajukan Pencegahan Perkawinan.

Yang dapat mengajukan pencegahan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dan salah seorang calon mempelai dan pihak yang berkepentingan.

2. Syarat Formal (objektif), yaitu tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut undang-undang atau hukum agama, yaitu : <sup>13</sup>

a. Penelitian

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Penelitian ini dilakukan terhadap surat-surat keterangan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi misalnya, surat keterangan dari Kepala Kelurahan, surat izin dari orang tua atau Pengadilan, surat kuasa, dan lain-lain.

b. Pengumuman

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 setelah dipenuhi syarat-syarat serta tidak ada halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 83

### c. Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat perkawinan yang sah, maka akan menimbulkan hubungan hukum terhadap harta benda perkawinan. Yang merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan perkawinan antara suami istri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, selama para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat



bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christien Indonesiers (Stbld.1933 No.74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakandengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **4. Larangan-Larangan Perkawinan**

Menurut Pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dan garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- e. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- f. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- g. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali jika :

1. Mendapat izin dari Pengadilan (berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

2. Dengan alasan bahwa istri, yaitu : (Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- a. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- b. Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Tidak dapat melahirkan keturunan;

Menurut Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dapat dipikirkan matang-matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pada ayat (2) tenggang jangka waktu tunggu tersebut pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

## **5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan**

Menurut Pasal 31 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kedudukan suami istri adalah :

1. Seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Sedangkan kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 30 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi susunan masyarakat. Didalam Pasal 32 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Menurut Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

#### **1. Kematian;**

Putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri, disebut juga oleh masyarakat dengan ” cerai mati ”.

#### **2. Perceraian;**

Putusnya perkawinan karena perceraian, disebut oleh masyarakat dengan istilah ” cerai hidup ”

Putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) jenis, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Cerai gugat, yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam dan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
- b. Cerai talak, yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, Hal.38

### 3. Putusan Pengadilan;

Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri, tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa perceraian mempunyai arti, bahwa diputuskannya perkawinan tersebut oleh Hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan Hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

### **2. Alasan-alasan Perceraian**

Tujuan Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Lili Rasjidi, walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas ditengah jalan karena sebab-sebab tertentu.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sebagai berikut : <sup>15</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.

Pengertian zinah pada alasan perceraian ini, adalah zinah menurut konsep agama. Pengertian pemabok, pematik, dan penjudi ditafsirkan oleh Hakim;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada alasan perceraian ini, adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kata " berturut-turut" berarti kepergian salah satu pihak tersebut harus penuh 2 (dua) tahun lamanya dan dalam waktu itu yang bersangkutan tidak pernah kembali. Rasio dari ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang ditinggalkan. Maksud "hal lain diluar

---

<sup>15</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Alumni Bandung, 1983, Hal. 5

kemampuannya” pada alasan perceraian ini, maka Hakim yang menentukannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

”Hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat” maksudnya adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan tetap setelah Perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim Pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Penentuan lima tahun dianggap cukup menentukan apakah perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Kekejaman atau penganiayaan yang dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan jasmani namun juga jiwa para pihak. Sebaiknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi ahli hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan dan pihak lain yang diperlukan dengan kejam dan dianiaya. Selain itu juga perlu di dengar keterangan dari orang yang melihat dan atau mendengar secara langsung kekejaman dan penganiayaan itu dilakukan. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat itu sendiri, sehingga Hakimlah yang harus menafsirkan;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Tujuan dari alasan perceraian ini adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang menimpa pihak lain. Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah harus yang menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini Hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud dalam alasan perceraian tersebut;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini merupakan persoalan yang bersifat relatif karena Hakimlah yang menilai dan menetapkan dengan

sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami istri maka sudah sewajarnya para pihak memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas.

### **3. Akibat Perceraian**

Akibat dari perceraian akan menimbulkan akibat hukum, terhadap:<sup>16</sup>

1. Orang tua/anak
2. Harta Benda Perkawinan

#### **Ad.1. Orang tua/anak**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberikan keputusan;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

---

<sup>16</sup> K. Wantjik Saleh, S.H, *OP. Cit*, Hal. 34-35

keadaan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **Ad.2. Harta benda perkawinan**

Mengenai harta benda perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, 37. Dalam Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami maupun istri.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda perkawinan, terbagi atas : <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, Hal. 188

1. Harta bersama;
2. Harta Pribadi;
  - a. Harta bawaan suami
  - b. Harta bawan istri
  - c. Harta hibah/warisan suami
  - d. Harta hibah/warisan istri

#### **Ad.1. Harta bersama**

Menurut Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang dipeoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara dimulainya sebuah perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup).

Harta bersama terdiri dari yaitu :<sup>18</sup>

1. Hasil dan pendapatan suami
2. Hasil dan pendapatan istri
3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Pada dasarnya harta bersama hanya meliputi, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Hasil dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 188

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 189

- b. Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan istri sepanjang perkawinan;
- c. Dengan demikian harta bersama merupakan hasil dan pendapatan suami istri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara otomatis menjadi harta kekayaan bersama.

## **Ad.2. Harta pribadi**

Harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak masuk kedalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta pribadi terdiri dari :<sup>21</sup>

- a. Harta bawaan suami atau istri
- b. Harta hibah suami atau istri
- c. Harta warisan suami atau istri

Sesuai dengan kata “hak sepenuhnya” pada Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak yang paling penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik, mempunyai wewenang yang paling luas meliputi *beheer* (pengurusan) dan *beschikking* (pemilikan). Kata “masing-masing” menunjukkan bahwa suami istri dapat bertindak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 193

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 193

sendiri-sendiri tanpa bantuan, kuasa maupun persetujuan dari suami atau istrinya.

Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan juga bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya namun tunduk kepada Hukum Adat, maka dalam Hukum Adat ini dikenal harta bersama/harta gono-gini. Jika terjadi perceraian, maka masing-masing suami atau istri mendapat separuh dari harta bersama.

Sedangkan bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen namun tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal harta bersama, maka jika terjadi perceraian harta bersama dibagi menjadi dua, yaitu separuh untuk pihak suami dan separuh untuk pihak istri.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sita**

#### **1. Pengertian dan Tujuan Sita**

Sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Bertitik tolak dari definisi diatas maka jelaslah bahwa tujuan sita itu pada dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (illusoir) apabila hanya menang dalam perkara tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan.

## **2. Macam dan Prosedur Sita**

Adapun macam sita (beslag) terbagi menjadi 4 (empat) :

- a. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
- b. Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag)
- c. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)
- d. Sita Eksekusi (Executoir Beslag)

### **a. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ialah : Sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan, kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya "tidak illusoir" atau "tidak hampa" pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan).

Dasar hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terdapat pada Pasal 227 HIR/261 RBg (Rechtsreglement Buitenswesten) yang bunyinya : "Apabila ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seorang yang berhutang yang terhadapnya belum lagi diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah diucapkan suatu keputusan hukum tetapi belum dapat dijalankan. Dan dia sedang berusaha menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang bergerak atau



barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari pihak penagih hutangnya, maka atas permohonan yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri atau apabila yang berhutang bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah Pemerintahan Magistraat dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri tidak bertempat tinggal di tempat yang disebut belakangan itu, magistraat di daerah tempat tinggalnya barang tersebut disita, untuk menjaga hak Pemohon yang kepadanya selanjutnya diberitahukan untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri pada tanggal dan hari yang ditentukan untuk itu, seharusnya pada hari persidangan pertama Pengadilan yang akan datang untuk memajukan dan membenarkan gugatannya".

Salah satu tugas Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yang penting demikian juga setelah berlakunya Undang-undang No.7 tahun 1989 bagi Peradilan Agama adalah melakukan penyitaan. Pasal 103 ayat C Undang-undang No.7 tahun 1989 serta pasal 65 Undang-undang No.2 tahun 1986 menyatakan juru sita bertugas melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.

Dalam Hukum Acara Perdata yaitu dari keseluruhan peraturan perundangan yang berlaku dalam kerangka pelaksanaan proses beracara perdata di muka Pengadilan, baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, salah satu hal yang menarik adalah masalah SITA.

Sejak dari proses tuntutan hak ("rechtsuordering") dimulai dalam bentuk suatu gugatan perdata sampai dengan akhir penyelesaian perdata dengan jalan eksekusi, seringkali terdapat suatu usaha dan upaya salah satu pihak (penggugat) agar terhadap gugatan tersebut akan dapat menikmati hasilnya.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengajukan Sita Jaminan yang dalam pelaksanaannya menjadi salah satu tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Juru Sita sebagai salah satu bagian dari kepaniteraan Pengadilan yang termasuk dalam kelompok tenaga fungsional karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya dituntut untuk bersikap hati-hati agar dalam melaksanakan tindakan hukum penyitaan (sita jaminan) itu dilakukan dengan tepat dan benar.

Lain dari pada itu diperlukan adanya upaya keseragaman persepsi dan interpretasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga pada akhirnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dapat tercapai. Barang-barang yang disita dibekukan, untuk kepentingan kreditur (penggugat) disini barang-barang tersebut disimpan (diconservee) untuk jaminan, tidak boleh dipindahtangankan/dijual 197 ayat 9, 199 HIR 212, 214 RBg.

#### **Prosedur Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :**

##### **a. Permohonan Sita**

Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita terhadap obyek kepada Pengadilan dengan alasan yang cukup, sedangkan Tergugat berusaha menghilangkan akan memindahtangankan atau menyingkirkan dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut. Permohonan tersebut dilakukan bersamaan dengan surat gugatan, atau saat sedang berlangsungnya sidang pemeriksaan materi perkara yang digugat setelah putusan perkara dibacakan sampai saat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Penetapan Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Berdasarkan permohonan sita, maka Ketua atau Ketua Majelis memeriksa permohonan sita tersebut, apabila menurut penilaian Ketua/Ketua Majelis permohonannya dapat dikabulkan maka dibuatlah penetapan untuk dilakukan.

c. Biaya penyitaan

Setelah adanya penetapan sita, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya sita sebesar yang telah ditentukan.

d. Pelaksanaan Sita.

1) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, harus dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- Warga Negara Republik Indonesia
- Berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun.
- Dikenal serta dapat dipercaya (pasal 210 ayat 2 RBg)

- 2) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan penyitaan, sebaiknya memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa tentang maksud akan dilaksanakan penyitaan.
- 3) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti beserta saksi-saksi mendatangi lokasi barang yang akan diletakkan sita serta memberitahukan maksud kedatangan Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada termohon sita atau siapa saja yang ditemui.
- 4) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti meneliti barang-barang yang dimohonkan sita, baik macam, jenis, jumlah ukuran dan lain-lain.
- 5) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita yang isinya sebagai berikut :
  - a. Dicatat secara rinci barang-barang yang disita;
  - b. Menjelaskan dengan terang jenis serta ukurannya;
  - c. Pembuatan Berita Acara Sita, dilakukan dihadapan termohon sita, jika ada ditempat;
  - d. Jika termohon sita tidak ada sewaktu diletakkan sita, maka Berita Acara diberitahukan kepadanya,
  - e. Berita Acara Sita ditandatangani oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan kedua orang saksi, dan sebaiknya termohon sita dan Lurah/ Kepala Desa ikut juga menandatangani;
  - f. Salinan Berita Acara Sita disampaikan kepada Termohon sita, sedangkan tindasan Berita Acara Sita diserahkan kepada

pemohon sita. Ketua/Ketua Majelis dan Kepala Desa/ Lurah untuk diumumkan seluas mungkin (Pasal 213 ayat 2 RBg)

6) Apabila Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, tidak menemukan barang-barang sesuai dengan penetapan Sita maka dibuatlah berita acara yang menyatakan sita tidak dapat dilaksanakan karena barang-barang tersebut tidak ditemukan (Non Bevinding)

7) Penjagaan Barang Sitaan.

- a. Barang-barang sitaan penjagaannya diserahkan kepada si tersita atau;
- b. Dipindahkan ke tempat lain yang dianggap lebih aman (pasal 212 RBg)

Sebelum melanjutkan menguraikan eksekutorial beslag perlu diingat kembali oleh juru sita bahwa CB dengan sendirinya berkekuatan eksekutorial (ini merupakan azas) pada saat perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap Jadi tidak ada lagi sita eksekusi terhadap barang yang sudah berada dibawah CB.

Perlu kiranya diperhatikan bahwa sita executie ini merupakan suatu jenis sita yang sangat penting sebab disini akan tampak adanya wibawa hukum atau suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila putusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Selanjutnya apabila telah diterima surat permohonan executie dari pihak yang menang dan yang telah selesai administrasinya, maka Ketua Pengadilan harus menuangkan dalam bentuk suatu Penetapan, agar pihak yang telah dipanggil untuk ditegor, supaya memenuhi isi putusan pengadilan yang dimintakan executie itu dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari (pasal 196 HIR). Tegoran ini harus dibuat berita acaranya oleh juru sita.

Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan pihak yang ditegor tetap membangkang, maka Ketua pengadilan barulah memerintahkan Panitera/juru sita untuk melaksanakan Sita executie, yang dituangkan dalam bentuk penetapan.

**b. Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag).**

Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag) ialah : Sita yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat mengenai suatu barang bergerak berdasar alasan hak milik Penggugat yang sedang berada di tangan Tergugat. Benda tersebut dikuasai secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau Tergugat tidak berhak atasnya.

Dasar hukum Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag) diatur pada Pasal 226 HIR atau Pasal 260 ayat 1 RBg yang berbunyi : "Seorang pemilik barang bergerak dapat secara lisan atau secara tertulis mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat pemegang barang itu tinggal atau berdiam, agar barang tersebut disita dari pemegang itu".

Sita jaminan dilakukan terhadap barang miliknya sendiri (kreditur/penggugat) yang dikuasai oleh orang lain dengan tujuan bahwa :

- Sita ini untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon/kreditur, bukan untuk menjamin suatu tagihan berupa uang;
- Sita ini berakhir dengan penyerahan barang yang disita;

Pemohon:

- 1) Setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain Pasal 1917 ayat (2), 1751 KUHP. Per. Ind;
- 2) Setiap orang yang mempunyai hak reklame yaitu hak dari pada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya apabila harga tidak dibayar 1145 KUHP. Per. Ind;

Dalam Sita jenis ini ditinjau dari obyeknya yaitu barang bergerak milik pemohon dan tidak diperlukan adanya dugaan yang beralasan seperti pada sita conservatoir, bahwa pihak yang berhutang/tergugat ada dugaan akan berusaha untuk menggelapkan atau melarikan barang tersebut (Pasal 227 ayat 1 HIR/261 ayat (1) RBg). Oleh karena itu pihak yang berhutang/tergugat tidak perlu didengar. Juru sita atau juru sita pengganti harus mengetahui bahwa obyeknya/barang yang disita harus tetap ada pada pihak tersita/tergugat sebagai orang yang semula menguasai barang tersebut untuk disimpan kecuali apabila tidak bisa lain seperti karena tergugat

telah melarikan diri, maka barang tersebut disimpan ditempat lain yang patut.

Sangat keliru untuk menitipkan barang yang disita itu kepada Kepala Desa/Lurah, lebih-lebih kepada penggugat. Hal ini tidak dibenarkan Penggugat dapat saja menguasai barang miliknya kembali lewat putusan provisional atau putusan akhir yang dapat dilaksanakan serta merta.

Akibat hukum dari sita revindicatoir: Pemohon/penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita dan dilain pihak terkena sita/pihak tersita dilarang untuk mengasingkannya dengan ancaman pidana. Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan harus dicantumkan : sita revindicatoir dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan kepada penggugat. Sebaliknya apabila ditolak maka sita ini dinyatakan dicabut.

#### **Prosedur Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag)**

- 1) Pemohon mengajukan permohonan Sita Hak Milik kepada Pengadilan dimana barang miliknya sedang berada, agar barang miliknya tersebut disita dari pemegangnya;
- 2) Dalam mengajukan permohonan Sita Hak Milik, Pemohon harus jelas menguraikan barang apa yang diminta sita, yang terbatas kepada barang-barang yang bergerak saja seperti mobil, rumah, tanah, dan lain-lain;



- 3) Pengadilan sebelum mengeluarkan surat Penetapan Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag) terlebih dahulu meneliti kebenaran barang yang menjadi milik Pemohon dengan meneliti surat-surat dan jenis-jenis serta identitas lainnya dari barang tersebut;
- 4) Apabila Pemohon sita tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka sita dijalankan berdasarkan Surat Perintah dari Ketua Pengadilan;
- 5) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti atas perintah Ketua Pengadilan melaksanakan tugas penyitaan setelah terlebih dahulu Pemohon sita membayar biaya sita pada Kepaniteraan Pengadilan;

**c. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)**

Sita Marital (Beslag) ialah Sita yang diletakkan atas harta bersama suami isteri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, i.c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian tersebut. Marital Beslag tidak boleh dijalankan secara partia (sebagian-sebagian).

Dasar hukum Sita Harta Bersama (Marital Beslag) terdapat dalam:

- 1). Pasal 823 Rv yang berbunyi :

"De maatregelen, welke de vrouw naar aanleiding Van art. 190 Van het Burgerlijk Wetboek mag in het werkstelle, Zijn de verzegeling, boedeloeschrijving en waardeering Van goederen, Conservatoir beslag op de roerende goederen van de gemeenschap of van de vrouw en Conservatoir beslag op de on roerende

goederen der gemeenschap, Overeenkomstige de bepalingen van de tien volgende artt (BW.251 RV.241,652 V,672 V,763 aV,763 h V,824,840).

(Bilamana si isteri masih dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam pasal 190 BW, maka tindakan penyegelan barang, Conservatoir beslag dari barang-barang bergerak milik bersama atau dari milik si isteri dan Conservatoir Beslag terhadap barang-barang tidak bergerak milik bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari sepuluh pasal berikut (BW. 251 RV. 241, 652 V,672 V,675-3,720 V,763 h V, 824, 840).

2). Pasal 24 ayat 2 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri".

Adapun Sita marital yang terdapat dalam Pasal 823 a-823 j RV :

Pemohon : isteri - yang tunduk kepada KUHP. Per. Ind. Selama sengketa perceraianya diperiksa di Pengadilan. Pemohon adalah isteri karena menurut KUHP. Ind. seorang isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan maritaal suaminya, maka sita maritaal ini disediakan bagi si isteri.

Dalam kaitan sita maritaal ini, hubungannya dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Undang-undang 7 tahun 1989 dimana dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 diberlakukan secara efektif pada 1 Oktober 1975, maka KUHPer. Ind. mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah Undang-undang No.1 tahun 1974, sedangkan menurut ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dimuat mengenai tiga jenis kekayaan.

Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974, tiga jenis kekayaan adalah :

1. Kekayaan isteri, yang didapat olehnya dari harta warisan dan penghibahan, dan;
2. Kekayaan suami, yang didapat olehnya dari harta warisan dan penghibahan, dan;
3. Kekayaan suami isteri, yang merupakan kekayaan bersama, yang didapat oleh mereka karena pekerjaan, usaha dan jerih payah mereka sendiri.

Di dalam HIR/RBg tidak mengenal sita maritaal, hanya diatur dalam RV, sedangkan Rv tidak berlaku, maka lewat rechtsvinding Hakim dalam praktek peradilan dapat menerapkan ketentuan Rv tersebut dan kiranya juga dapat memperluas sehubungan dengan Undang-undang ini juga tidak mengatur tentang "sita" kecuali dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 hanya diatur tentang harta bersama

suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak atau dalam gugatan perceraian atau diajukan tersendiri sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 66 ayat 5, pasal 78 angka C dan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

**d. Sita Eksekusi (Executoir Beslag)**

Sita Eksekusi (Executoir Beslag) ialah sita yang diletakkan atau barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi harus melalui pelelangan.

Sebagai dasar hukum sita eksekusi ini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 208 R.Bg yang bunyinya :

"Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau Kepala Pamongpraja (magistraat) yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran jumlah uang dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa

dalam karesidenan-karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli barang-barang harta pusaka hanya dapat disita apabila barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah tersebut (RV. 444. H9R 197)”.

**Prosedur Sita Eksekusi (Executoir Beslag) :**

- 1) Pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan si tergugat dengan secara sukarela.
- 2) Ketua Pengadilan, meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan sita eksekusi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan dengan sebuah penetapan maka dilakukanlah pemanggilan terhadap tereksekusi; untuk di aan-maning maksimal 8 (delapan) hari, terhitung sejak aan-maning dilakukan.
- 3) Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dengan alasan yang dapat dibenarkan/dipertanggungjawabkan maka ketidakhadirannya tersebut dapat dibenarkan dan si tergugat harus dipanggil kembali untuk di aan-maning.
- 4) Apabila ketidakhadiran si tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan/diterima, maka :
  - Gugur hak si tergugat untuk di aan-maning kembali
  - Tidak perlu untuk dipanggil kembali.

- Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi berupa penetapan, terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.

- 5) Berdasarkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tegugat (yang kalah)
- 6) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita eksekusi yang termuat nama barang-barang atau benda-benda apa saja yang dieksekusi.
- 7) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk itu.
- 8) Juru Sita atau juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan eksekusi terhadap sitersita/Tergugat, terlebih dahulu memberitahukan Kepada sitersita, setidaknya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan, agar sitersita tidak memindahtangankan barang-barang yang akan disita.
- 9) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, bahwa terhadap sitersita akan dilaksanakan sita eksekusi dan setidaknya Kepala Desa/Lurah setempat hadir pada waktu sita eksekusi itu dilaksanakan.

- 10) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat minta bantuan alat Negara/ Polri.
- 11) Setelah sita eksekusi dilaksanakan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dan saksi-saksi serta siterita menandatangani berita acara sita tersebut.
- 12) Terhadap barang-barang/benda-benda yang telah disita eksekusi menjadi tanggung jawab Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk mengawasinya, dan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

#### **D. Sita Marital**

##### **1. Pengertian, Arti, dan Tujuan Sita Marital**

Sita marital (*marital beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa atau dalam pengertian yang lainnya dapat diterjemahkan, bahwa sita marital adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami/istri) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.

Arti sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh dijalankan secara partia (sebagian-sebagian).

Setiap sita mempunyai tujuan tertentu, dalam sita revindikasi bermaksud menuntut pengembalian barang yang bersangkutan kepada Penggugat sebagai pemilik, sedangkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat. Tujuan sita marital berbeda dengan yang disebutkan diatas :

- Bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat (suami atau istri);
- Juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik (revindikasi);
- Akan tetapi tujuan utamanya untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.

Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat (suami istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.<sup>22</sup>

Dengan demikian pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat. Sehubungan dengan itu titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita marital adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian ini jangan terlampaui dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan

---

<sup>22</sup> Sudikno, *Op Cit*, hlm. 164



adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tetapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.

## **2. Pengaturan Sita Marital**

Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yang terdapat dalam :

a. Pasal 190 KUH Perdata yang berbunyi :

*Sementara perkara berjalan dengan ijin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.*<sup>23</sup>

Ketentuan tersebut dulunya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Tetapi sejak UU No.1 tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala ketentuan KUH Perdata mengenai Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian ketentuan Pasal 190 KUH Perdata tersebut, dapat dijadikan bahan orientasi sebagai kedudukan dalam hukum adat tertulis.

b. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> R. Subekti, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, cet. 25, hlm. 60

<sup>24</sup> PP tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan tanggal 1 April 1975, LNRI Tahun 1975, No. 12.

Menurut pasal ini “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri”.

Akan tetapi ketentuan ini lebih tegas dari Pasal 190 KUH Perdata, karena didalamnya terdapat perkataan menjamin terpeliharanya harta bersama. Namun terlepas dari itu, hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya. Sama-sama bermaksud mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama agar tidak jatuh kepada pihak ketiga.

c. Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989<sup>25</sup>

Bunyi dalam pasal ini persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 atau dapat juga dikatakan bahwa isi dan ketentuannya ditransfer dari pasal PP yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 78 huruf c, lingkungan peradilan agama pun telah memiliki aturan positif lembaga sita marital. Bahkan sita marital tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>26</sup> yang sama bunyinya dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian, landasan penerapan sita

---

<sup>25</sup> Undaaang-Undang tentang Peradilan Agama, diundangkan tanggal 29 Desember 1989, LNRI Tahun 1989, No. 49.

<sup>26</sup> Dinyatakan berlaku berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

marital dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 823 Rv yang berbunyi :

*Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUH Perdata adalah penyevelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama...*

Pasal ini merupakan salah satu diantara beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Maka dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 hanya terdiri dalam satu (1) pasal. Sedangkan dalam HIR dan RBG sama sekali tidak diatur mengenai sita marital.

Memperhatikan keadaan peraturan perundang-undangan yang demikian, jika pengadilan dan Hakim maupun praktisi hukum ingin meminta dan melaksanakan sita marital yang komprehensif, tidak ada salahnya mempergunakan pasal-pasal dalam Rv sebagai pedoman sesuai dengan asas kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

### **3. Lingkup Penerapan Sita Marital**

Jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul diantara suami istri.

a. Pada Perkara Perceraian

Penerapan sita marital yang paling utama pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami istri, maka hukum akan memberi perlindungan kepada suami atau istri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Dengan cara meletakkan sita diatas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta bersama kepada pihak ketiga.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUH Perdata, hak untuk mengajukan sita marital hanya diberikan kepada istri. Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan Pasal 105 KUH Perdata yang memberi kedudukan *matriale macht* (kepala persekutuan) kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada suami untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta istri dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta bersama berada di tangan suami. Kalau begitu layak dan sejalan memberi hak kepada istri untuk meminta sita marital agar suami tidak leluasa menghabiskan harta bersama selama proses perkara masih berjalan.

Berdasarkan apa yang digariskan KUH Perdata tersebut, maka tidak ada alasan memberi hak kepada suami untuk meminta sita marital, karena harta bersama seluruhnya berada ditangannya sendiri.

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

Pada dasarnya persoalan sita harta bersama diperlukan apabila terjadi perkara antara suami dan istri. Secara hukum perkara yang mungkin timbul diantara suami istri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perkara perceraian tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Seperti seorang suami yang mengajukan gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu, istri (selaku Tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonfensi, menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang pembagian harta bersama.

Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan proses sita marital diatasnya. Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.

c. Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta Bersama

Sita marital yang dimaksudkan diatas diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama. Jadi penerapannya bertitik tolak dari adanya perkara antara suami istri. Seolah-olah jika tidak terjadi perkara atau

pembagian harta bersama, sita marital tidak berfungsi dan tidak dapat diterapkan dalam penegakkan hukum diantara suami istri.

Hal ini benar jika semata-mata merujuk kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Akan tetapi, jika berorientasi kepada ketentuan hukum yang ada maka :

- ❖ sita marital dapat diterapkan penegakkannya diluar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama;
- ❖ oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama.

Penerapan yang demikian dapat berorientasi kepada ketentuan Pasal 186 KUH Perdata. Menurut Pasal 186 KUH Perdata tersebut :

- selama perkawinan berlangsung suami atau istri (aslinya hanya disebut istri), dapat mengajukan permintaan sita marital terhadap Hakim;
- namun permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada dalam keadaan bahaya karena :
  - 1) adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau istri yang nyata-nyata memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga;
  - 2) tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dilakukan suami atau istri yang dapat

membahayakan eksistensi dan keutuhan harta bersama  
sebagaimana mestinya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.Smg apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku**

##### **1. Duduk Perkaranya**

Dasar Gugatan Penggugat

Dasar Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah :

1. Penggugat adalah istri dari TATANG HASAN PURNAMA alias T. HASAN PERMANA alias TJIA SEN PENG Bin TJIA MIN TJHON alias AMIN, beralamat di Jalan Kapas Raya D-833 Genuk Indah Kelurahan Gebangsari, Semarang ;
2. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2002 Tergugat pergi ke Bandung meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mengembangkan usaha di Bandung tetapi kenyataannya sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Tergugat tidak pernah lagi kumpul dengan Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bahkan yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah ternyata Tergugat sering membawa wanita diluar nikah ketempat tinggalnya di Bandung tanpa seizin Penggugat ;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Bandung dan berhasil membuka usaha bersama dengan Penggugat, dalam perjalanannya kehidupan



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran diantara mereka bahkan Penggugat sering diperlakukan kasar, dipukuli, dianiaya oleh Tergugat. Akibatnya Penggugat mengalami penderitaan baik lahir maupun bathin karena sikap dan perilaku Tergugat yang amat kasar kepada Penggugat ;

4. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan GUGATAN CERAI karena Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Semarang untuk berkumpul dengan Penggugat dan anak-anaknya. Dan apabila Penggugat menemui Penggugat dengan cara memukul, menendang, menyeret Penggugat dan mengurungnya dalam kamar yang mengakibatkan Penggugat menderita tekanan bathin dan luka-luka, memar pada beberapa bagian tubuh Penggugat ;
5. Bahwa yang paling menyakitkan Penggugat adalah sikap dan perilaku Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain diluar nikah dan kadang-kadang membawanya ke Rumah di Bandung tanpa persetujuan Penggugat selaku istri, bahkan Tergugat membelikan berbagai kebutuhan wanita lain tersebut tanpa persetujuan Penggugat ;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selain mempunyai anak aquo posita 2 (dua), juga mempunyai harta bersama (gono-gini).
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan selain mempunyai harta benda yang diperoleh bersama juga mempunyai sejumlah hutang bersama di Bank dan Supplier.

8. Bahwa untuk menjamin adanya nilai gugatan atas obyek sengketa, dan menghindari kemungkinan terjadinya pengalihan kepemilikan, diperjualbelikan, pemindahtanganan, diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain atas obyek sengketa serta guna menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang dapat mengakibatkan meningkatnya kerugian bagi Penggugat, maka mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)/Sita Marital atas seluruh harta bersama/gono gini yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara ;
9. Atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan tuntutan :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - b. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)/Sita Marital atas seluruh harta bersama (gono gini) dalam perkara ini.
  - c. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam akte perkawinan No. 243/1981 pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Semarang tanggal 26-5-1981 telah putus karena perceraian ;
  - d. Menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama (gono gini) a quo tertulis dalam posita 8 (delapan) yang wajib dibagi secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

- e. Menyatakan menguatkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)/Sita Marital atas seluruh harta bersama (gono gini) yang diperoleh bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan.
- f. Menyatakan segala hutang yang masih ada pada pihak ketiga yakni Bank dan Supplier.
- g. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- h. Menghukum Tergugat membayar denda kepada Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan ;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **2. Jawaban Tergugat**

Jawaban Tergugat atas gugatan yang diajukan Penggugat yaitu :

1. Dalam Eksepsi (bukan dalam pokok perkara) :
  - Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak benar dan sangat keliru, karena pencantuman mengenai Permohonan Sita Marital/Sita Jaminan Atas Harta Bersama/Gono-gini diturutsertakan dengan Gugat Cerai.

- Bahwa sesuai **Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Mei 1983 No.913.K/Sip/1982**, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1983-I, halaman 218, tertera bahwa "Gugatan Perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan".
- Bahwa sudah jelas mengenai Gugatan permohonan Sita Marital/Sita Jaminan Atas Harta Bersama/Gono-gini mohon agar dikesampingkan dahulu.

Maka berdasarkan uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar memberikan Putusan ini agar memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan mengenai Permohonan Sita Marital/Sita jaminan Atas Harta Bersama/Gono-gini tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak .
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## 2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis hakim agar seluruh uraian di dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

3. Bahwa benar dalil yang dikemukakan Penggugat pada point 1 dalam gugatannya, dimana telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, berdasarkan Akta Perkawinan No.243/1981 tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No.Pemr.3995/1981 tanggal 26 Mei 1981 serta disyahkan pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Leges : Rp.250,-.No.606/27-5-1981 PENG NEG SMG.(bukti T-1)
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat berdomisili di Jalan kapas Raya D-833 RT.007/RW.002, Kel.Gebangsari, Kec.Genuk, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah adalah tidak benar, justru yang sebenarnya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun yang lalu, diketahui bahwa Tergugat telah berdomisili di Kota Bandung di jalan Pelajar Pejuang 45 no. 46 RT.008/RW.002, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung yang berdasarkan No. Kartu Tanda Penduduk No.1050110107503003, dan Kartu Keluarga No.1015011/00/32078, atas nama Kepala keluarga T. Hasan Permana.(bukti T-2 dan T-3)
5. Bahwa perlu diketahui Tergugat sudah menganggap Penggugat sudah tidak ada artinya lagi dan tidak menghargai sama sekali Penggugat sebagai suami ataupun ayah dari tiga orang anak, karena Penggugat sendiri tidak pernah diberitahukan mengenai pernikahan anak

wanitanya yang menurut Penggugat adalah anak hasil dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat:

6. Bahwa justru Penggugatlah yang berusaha dengan berbagai cara untuk menyudutkan kesalahan atau beritikad tidak baik pada Tergugat dengan anggapan bahwa Tergugat adalah suami dan ayah yang tidak baik serta tidak bertanggung jawab pada keluarganya.
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 3, 4, 5, 6 dan 7 dalam gugatannya adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena yang sebenarnya terjadi adalah wanita-wanita yang suka pergi ataupun datang ke rumah Tergugat adalah wanita-wanita Yang tidak lebih dari seorang teman atau rekan kerja, dan mengenai bahwa Tergugat sering melakukan penganiayaan atau memukul Penggugat seharusnya tanya pada diri dan hati nurani Penggugat sendiri bahwa sebenarnya siapa yang memukul atau menganiaya ataupun sering berkata kasar? Jadi anggapan Penggugat hanyalah hal yang dibuat-buat atau mengada-ada.
8. Bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sudah seringkali terjadi percekocokan dan perselisihan berlarut-larut dan selalu tidak dapat terpecahkan, justru Penggugat tidak mau mendengar apa kata Tergugat selaku suami, apabila ada hal-hal yang harus dibicarakan untuk mencari solusi yang terbaik dengan kata lain Tergugat selalu keras kepala dan mau menang sendiri yang merasa dirinya selalu benar, padahal diketahui apa yang Penggugat

inginkan nantinya akan menimbulkan malapetaka yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga, makanya Tergugat meninggalkan Penggugat sambil menembangkan usaha di Bandung dan tujuan agar dapat sedikit menyadarkan atas kelakuan Penggugat selama ini apad Tergugat, tapi kenyataannya justeru tambah tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat dengan Penggugat.

9. Bahwa perlu diketahui pula bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang selalu terjadi perselisihan dan percekcoan juga diperkeruh dengan intervensi dari pihak luar yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, mengakibatkan kondisi rumah tangga semakin hari semakin memburuk sehingga sulit dipertahankan dan Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap intervensi tersebut juga ditambah sifat Penggugat sendiri yang sudah tidak pernah menghargai dan menghormati Tergugat sebagai seorang kepala Keluarga.
10. Bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga semakin hari semakin memburuk dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan lagi hingga sekarang.
11. Bahwa dikarenakan percekcoan /perselisihan sebagaimana telah diuraikan diatas, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semakin jauh dari cita-cita perkawinan, maka perceraian adalah jalan satu-satunya bagi Tergugat sesuai alasan sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. Tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas; maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Permohonan Sita Marital/Sita Jaminan terhadap harta bersama/harta gono-gini yang diajukan Penggugat adalah tidak syah dan tidak berharga
3. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai Akta Perkawinan No.243/1981 tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No.Pemr.3995/1981 tanggal 26 Mei 1981 serta disyahkan pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Leges : Rp.250,-.No.606/27-5-1981 PENG NEG SMG. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Semarang untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Tatang Hasan Purnama dengan Henny Suharningsih. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



6. Putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Tergugat, dalam persidangan tanggal 29 November 2005 Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya berpegang teguh pada dalil gugatannya.

**3. Pembuktian**

Bukti Yang Diajukan Penggugat

Dalam perkara ini bukti yang diajukan oleh Penggugat ada 2 macam yaitu :

1. Bukti Surat terdiri dari :

- Foto Copy Akte Perkawinan No. 243/1981 tanggal 26 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya II Semarang, Warga Negara Indonesia (bukti P-I) ;
- Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 21 Maret 2002 No : 11.5005/96/01294, No. AH 069851 yang telah diperbaharui dengan Kartu Keluarga tanggal 26 Juli 2005 No : 11.5005/96/01294, No. 009999 atas nama Kepala Keluarga T. Hasan Permana (bukti P-2a, 2b) ;
- Foto Copy Kartu Keluarga No : 474/4597/III/90 tanggal 13-III-90 yang telah diperbaharui dengan Kartu Keluarga tanggal 21 Maret 2002 No : 11.5005/96/01294 dan Kartu Keluarga tanggal 26 Juli 2005 No. 009999851 (P-3) ;

2. Bukti Saksi yaitu seorang saksi bernama : ANA, yang menerangkan :
- Saksi mengenal dengan Tergugat karena saksi Tantenya ;
  - Saksi tahu Pak Hasan dan Ibu Henny Suharningsih melaksanakan perkawinan di Semarang ;
  - Saksi tahu Pak Hasan dan Ibu Henny Suharningsih sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
  - Saksi tahu nama anak-anaknya ;
  - Saksi tahu kalau ada gugatan perceraian yang diajukan Ibu Henny Suharningsih ;
  - Saksi tahu sebab Ibu Henny Suharningsih mengajukan perceraian karena Pak Hasan suka memukul Ibu Henny Suharningsih dan Pak Hasan mempunyai wanita simpanan ;
  - Saksi tahu kalau Pak Hasan suka memukul dan mempunyai wanita simpanan karena Ibu Henny Suharningsih sering mengadu kepada saksi ;
  - Saksi tahu Pak Hasan sekarang di Bandung dengan simpanannya dan sudah 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa sebelum di Bandung Pak Hasan tinggal di Semarang dengan Ibu Henny Suharningsih ;
  - Saksi tahu harta Pak Hasan dan Ibu Henny Suharningsih/ usahanya yang di Bandung dikelola Pak Hasan dan yang di Semarang dikelola oleh Ibu Henny Suharningsih ;

- Menurut saksi yang terbaik dari keluarga Pak Hasan dan Ibu Henny Suharningsih adalah bercerai ;

#### **4. Bukti Yang Diajukan Tergugat**

Dalam perkara ini Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) macam bukti saja yaitu :

1. Bukti Surat terdiri dari :

- a. Photo Copy Akta Perkawinan No. 243/1981 tertanggal 26 Mei 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan disahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Leges : Rp. 250,- tertanggal 27 Mei 1981 PENG NEG SMG atas nama Tatang Hasan Purnama dan Henny Suharningsih.
- b. Photo Copy yang sesuai dengan aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk No. 1050110107503003 atas nama T. Hasan Permana dengan alamat Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 46 Rt.008/Rw.002, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Aziz Rahman, SH.
- c. Photo Copy yang sesuai dengan aslinya yaitu Kartu Keluarga No. 105011/00/32078 atas nama Kepala Keluarga T. Hasan Permana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Lengkong.

#### **5. Pemeriksaan Setempat**

Dalam perkara ini pada tanggal :

- 9 Januari 2002 telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu ditempat tinggal Ny. Heny Suharningsih di Jl. Kapas Raya C-332 dan D-833

Kota Semarang yang dihadiri oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, dan dua orang saksi ;

- 1 Maret 2006 telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu ditempat tinggal T. Hasan Permana di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 46 Bandung yang dihadiri oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, Kuasa Tergugat dan dua orang saksi ;

#### **6. Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam perkara tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pencatatan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Semarang tertanggal 26 Mei 1981 (bukti P-1 sama dengan bukti T-1 dan bukti T-3) ;
2. Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan mereka tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni :
  - Ida Widianingsih, perempuan lahir pada tanggal 16 Nopember 1974 di Bandung ;
  - Dian Mardiani, perempuan, lahir pada tanggal 6 Januari 1976 di Bandung ;
  - Agung Drajat Martha, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Desember 1981 di Semarang ; (bukti P-2a, 2b dan bukti P-3) ;
3. Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun dalam tahun-tahun

belakangan ini telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ;

4. Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi di persidangan, sebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat suka ringan tangan pada Penggugat dan juga karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) selain Penggugat ;
5. Menimbang, bahwa adanya perkecokan yang terus menerus antara sepasang suami-isteri menjadi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
6. Menimbang, bahwa dengan adanya perkecokan yang terus menerus antara suami-isteri yang merupakan satu ikatan lahir batin menurut hukum (*Vir Et Uxor Censetur in lege una persona*) sehingga tidak dapat diperbaiki lagi (*onheerbare Tweespalt*) maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal I Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga

Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan perceraianya patutlah dikabulkan ;

8. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (met alle rechtsgevolgen) ;
9. Menimbang, bahwa agar diterbitkan Akta Perceraianya, maka salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde atau res judicata) haruslah disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Semarang ;
10. Menimbang, bahwa segala harta benda yang diperoleh dari perkawinan menjadi harta bersama (gono gini) yang karena perceraian, harta bersama tersebut haruslah diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ;
11. Menimbang, bahwa tuntutan mengenai sejumlah utang yang ada pada beberapa bank dan pada sejumlah supplier untuk dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis, tuntutan seperti ini tidak dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian sehingga putusan ini haruslah ditolak ;
12. Menimbang, bahwa sita marital yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.199/Pdt.G/2005/PN.Smg. Jo. Berita Acara Sita

Marital Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 6 Januari 2006 atas sejumlah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan Sita Marital yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 199/Pdt.G/2005/PN.Smg Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 120/Pdt.Eks/HT/2006/PN.Bdg. tanggal 23 Pebruari 2006 berikut Berita Acara Sita Marital Pengadilan Negeri Bandung No. 114/PDt/DEL/2006/PN.Bdg. tertanggal 01 Maret 2006 atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah beralasan dan dapat dipertahankan. Dengan demikian, sita marital yang diletakkan di dua wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Bandung haruslah dinyatakan sah dan berharga ;

13. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan segala utang yang masih ada pada pihak ketiga baik pada Bank maupun pada supplier di Semarang dan di Bandung, menurut Majelis, tidak dapat diajukan dalam gugatan perceraian sehingga tuntutan ini harus ditolak ;
14. Menimbang, bahwa tuntutan mengenai denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis, tuntutan ini tidaklah dapat diajukan dalam gugatan perceraian sehingga haruslah ditolak ;
15. Menimbang, bahwa tuntutan mengenai harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian, menurut Majelis tuntutan ini dapat

diajukan karena menurut Pasal 37 Tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harta bersama setelah perceraian dengan sendirinya diatur menurut hukumnya masing-masing ;

16. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pelaksanaan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat bahwa tuntutan ini tidak perlu diajukan karena dengan sendirinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan oleh Tergugat ;

17. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan gugatannya sebagian, maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang lain dan selebihnya ;

18. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang memang perkara maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim memutuskan :

19. Mengingat akan Pasal 1, 35 ayat (1) dan Pasal 37, 38, 39 ayat 92) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang berkaitan ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat HENNY SUHARNINGSIH alias HENNY SUHAENINGSIH binti MUMUH alias E. MUMUH dan Tergugat TATANG HASAN PERMANA alias T. HASAN PERMANA alias TJIA SEN PENG bin TJIA MIN TJPON alias AMIN, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita marital atas harta bersama baik yang ada di Semarang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 199/Pdt.G/2005/PN.Smg Jo. Berita Acara Sita Marital Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 9 Januari 2006 dan di Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 120/Pdt.Eks/HT/2006/PN.Bdg. tanggal 23 Pebruari 2006, Jo. Berita Acara Sita Marital Pengadilan Negeri Bandung No. 114/Pdt/DEL/2006/PN.Bdg. tertanggal 1 Maret 2006, adalah sah dan berharga ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau penggantinya yang cakap yang ditunjuk untuk itu menyampaikan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht gewijsde) kepada kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Semarang untuk mencatatkannya dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar nantinya dapat menerbitkan Akta Perceraianya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.198.000,- (Sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

## **7. Analisis Kasus**

Sita marital (marital beslag) merupakan bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama antara suami istri, apabila terjadi sengketa perceraian ataupun pembagian harta bersama. Mengenai sita marital tersebut tidak banyak diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dan tidak secara jelas juga disebut sita marital, hanya saja mengandung makna yang sama dengan sita marital, yaitu dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974. Demikian pula dalam HIR/RBg juga tidak mengatur tentang sita marital, karena sita marital lebih banyak diatur dalam ketentuan Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63).<sup>27</sup>

Adapun tujuan dari sita marital itu sendiri tidak lain, untuk menyimpan atau membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah tangan, selama dalam proses perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Jadi fungsi sita marital itu tidak sama dengan sita-sita yang lain yang bertujuan untuk menjamin tagihan pembayaran ataupun penyerahan hak milik. Permohonan sita marital itu

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Setyubudi Tejocahyono, SH, M.Hum, tanggal 15 September 2008, Pukul 10.00 WIB

dapat dimintakan bersama-sama dengan menunjukkan gugatan (menjadi satu dalam gugatan) atau dimintakan permohonan sita marital sendiri.<sup>28</sup>

Perlu diketahui lebih dahulu permasalahan sita marital, sangat erat kaitannya dengan sengketa :

- Perceraian
- Pembagian harta bersama
- Pengamanan harta perkawinan

Sedangkan diketahui dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.9 tahun 1975, sita marital hanya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, di dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas dengan kalimat “SITA MARITAL”, kemudian dalam HIR juga tidak mengatur mengenai sita marital. Oleh karena pengaturan sita marital dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, hanya terdiri dari satu pasal saja, dan itupun tidak mengatur mengenai bagaimana cara melaksanakan sita marital tersebut. Apakah cara melaksanakan sita marital itu dilaksanakan sama dengan cara melaksanakan sita-sita pada umumnya (sita jaminan, sita revindicatoir) ditambah cara melaksanakan sita marital itu mempergunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63).

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Sindu Sutrisno, tanggal 10 Nopember 2008, Pukul 09.30 WIB

Kenyataannya di dalam praktek cara melaksanakan sita marital dalam perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG ternyata tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sita marital sendiri dilaksanakan sama sebagaimana pelaksanaan sita jaminan pada umumnya yaitu dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 197, 198, 199, 227 HIR/208, 213, 214 RBg dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penggugat mengajukan permohonan sita marital bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatannya (mengenai pokok perkara);
2. Permohonan sita marital tersebut tentunya disertai alasan-alasan yang prinsipil dengan adanya kekhawatiran bahwa pihak lawan (Tergugat) akan memindahkan/menghilangkan barang-barang yang disengketakan;
3. Majelis Hakim mengeluarkan “penetapan” yang isinya mengabulkan permohonan sita tersebut. Dalam penetapan itu berisi barang bergerak dan tidak bergerak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang belum dibagi (contoh penetapan terlampir);
4. Dalam hal sita marital dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam penetapan tersebut memerintahkan kepada panitera untuk melaksanakan penyitaan tersebut, oleh karena ada barang yang disita terdapat diluar wilayah Pengadilan Negeri yang menyidangkan, maka mohon bantuan pada Pengadilan Negeri yang terdapat barang yang akan disita (contoh penetapan terlampir);
5. Panitera melalui Jurusita memberitahukan kepada para pihak dan Kepala Desa setempat akan dilangsungkan penyitaan, pada hari,

tanggal, jam, dan tempat yang telah ditetapkan serta memerintahkan agar para pihak dan Kepala Desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan tersebut;

6. Penyitaan dilakukan oleh panitera dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, dengan membawa surat tugas (contoh surat tugas terlampir);
7. Pada hari, tanggal yang telah ditetapkan tersebut panitera melaksanakan penyitaan, dibuatkan Berita Acara Sita, mencatat barang-barang yang disita, catatan kejadian selama penyitaan. Berita Acara sita tersebut ditandatangani oleh panitera (juru sita), saksi-saksi dan para pihak;
8. Selanjutnya Panitera (Jurusita) memberitahukan penyitaan tersebut kepada pihak tersita dan Kepala Desa setempat (lurah setempat) selanjutnya pemeliharaan barang-barang tersita tetap berada di tangan pihak tersita;
9. Panitera melaporkan penyitaan tersebut kepada Majelis Hakim yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan Berita Acara Sita;
10. Penyitaan tersebut dicatat dalam Buku Register penyitaan yang ada di Pengadilan, mengenai penyitaan terhadap barang tak bergerak, Berita Acara ditanya dilaporkan pada kantor Pertanahan setempat untuk dicatat dalam register yang bersangkutan (contoh berita acara terlampir);

11. Sita Marital tersebut dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim dalam amar putusan perkara No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, dikarenakan gugatannya dikabulkan.<sup>29</sup>

Seperti diketahui bahwa proses pelaksanaan sita Marital ternyata tidak diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. juncto PP No.9 th 1975, maupun dalam HIR, namun proses tata cara pelaksanaan sita marital banyak diatur dalam ketentuan yang ada pada Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63) Pasal 823 s/d pasal 830 Rv. Dalam kebutuhan praktek untuk kepentingan beracara (proses doelmatigheid) tidak ada salahnya dapat menerapkan atau berpedoman pada ketentuan pasal-pasal Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No.63) untuk melaksanakan sita marital karena sita marital itu merupakan bentuk sita khusus yang hanya diletakkan atas harta perkawinan, dengan tujuan untuk membekukan harta bersama suami istri, agar tidak berpindah pihak ketiga selama proses perceraian/pembagian harta bersama berlangsung sehingga ada permintaan sita marital maka proses pelaksanaan (tata cara melaksanakan sita marital) tidak mengacu pada tata cara pelaksanaan sita-sita pada umumnya yang diatur dalam HIR, namun dapat berpedoman ketentuan Pasal 823 s/d 830 Reglemen Acara Perdata/Rv (Reglement Op De

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Setyudi Tejocahyono, SH, M.Hum, tanggal 22 Desember 2008, Pukul 11.00 WIB

Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No.63), yang pada artinya cara melaksanakan sita Marital melalui tahap-tahap adanya :

- a. Penyegehan;
- b. Percatatan;
- c. Penilaian harta bersama;
- d. Penyitaan harta bersama.

Dengan demikian selama masa sita tidak dapat dilakukan peralihan harta bersama untuk kepentingan keluarga kecuali dengan izin dari Pengadilan. Jadi dalam pelaksanaan sita marital menurut ketentuan yang ada dalam RV (Reglement Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No.63) adalah tindakan yang mendahului dari sita marital itu sendiri.

**B. Sita marital yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan No. 199/Pdt.G/2005PN.SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga).**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975 selama berlangsungnya gugatan perceraian dapat dimintakan sita marital yang tujuannya untuk menjamin atau membekukan harta bersama dalam perkawinan, agar tidak berpindah tangan kepada pihak ke-3. Jadi tujuan sita

marital menurut ketentuan pasal tersebut tidak untuk membayar suatu hutang (suatu tagihan uang/penyerahan barang).

Tujuan sita marital (sita harta bersama) antara lain untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian/pembagian harta bersama berlangsung.<sup>30</sup> Sedangkan fungsi dari dimohonkannya sita marital adalah untuk melindungi, hak pemohon sita marital dengan menyimpan atau membekukan barang yang disita agar jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga.<sup>31</sup>

Tujuan atau fungsi dari meletakkan sita marital, bukan untuk menjamin tagihan hutang (tagihan pembayaran hutang) dan bukan untuk menuntut penyerahan barang milik, serta berakhirnya sita marital itu sendiri tidak dengan penyerahan barang atau penjualan barang yang disita melalui sita eksekutorial. Namun berakhirnya sita marital antara lain dikabulkannya gugatan perceraian dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan tersebut yang kemudian dilakukan pembagian harta bersama. Oleh karena itu diketahui di dalam praktek yang terdapat dalam putusan perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, tentang gugatan perceraian disertai permohonan sita marital dalam gugatan itu dikabulkan, maka dalam amar putusannya sita marital tersebut dinyatakan sah dan berharga. Sedangkan dalam perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga amar putusan yang menyatakan sita

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.369.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 92.



maritalnya sah dan berharga, tentu akan meningkat menjadi sita eksekusi (sita eksekusi yang tidak secara langsung). Pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial, akan tetapi hal tersebut sangat bertentangan dengan sifat sita marital itu sendiri yaitu hanya membekukan barang-barang yang disita, hingga sampai ada putusan pembagian harta bersama, dan telah dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut.

Namun kenyataan yang ada dalam praktek, untuk perkara No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) tidak juga dimohonkan eksekusi oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika kita mengacu pada Pasal 826 Rv, apabila sita marital dikabulkan dalam putusan pembagian harta bersama, mewajibkan untuk mengumumkan putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama, dengan cara menempatkan kutipan putusan tersebut dalam surat kabar. Hal ini dimaksudkan agar putusan pengabulan atas penyitaan dapat lebih sempurna.

Dalam praktek peradilan ternyata sita marital tidak diatur dalam HIR/RBg, sita marital ternyata banyak diatur dalam Reglemen Acara Perdata/Rv (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63) yaitu Pasal 823 a s/d 823 j sedangkan dalam kebutuhan praktek apabila dirasakan perlu dan berguna untuk para pencari keadilan maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv khususnya mengenai lembaganya yaitu lembaga sita marital itu sendiri yang seperti kita ketahui sita

marital itu sendiri kaitannya adalah terhadap masalah perkawinan khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Ternyata diketahui dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 tahun 1975 dalam Pasal 24 (2) huruf c tidak menyebutkan secara jelas kalimat sita marital namun ditentukan dalam Pasal 24 (2) huruf c yang berbunyi “*selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri* “, maksud dari ketentuan pasal tersebut tidak lain untuk menjamin/melindungi menyimpan, membekukan barang-barang harta bersama selama proses pemeriksaan sengketa harta perceraian di Pengadilan Negeri. Jadi fungsi dari sita marital tidak lain adalah untuk melindungi pemohon sita (Penggugat/pihak yang berperkara) selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung dengan cara membekukan, menyimpan barang-barang harta bersama yang disita agar jangan sampai dipindahtangankan jika berdasarkan UU Perkawinan tersebut diatas ternyata hanya ditemukan 1 pasal saja yang menentukan adanya sita marital yaitu Pasal 24 (1) huruf c PP 9 tahun 1975.

Namun dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 ternyata diketahui tidak mengatur bagaimana caranya melaksanakan sita marital begitu juga baik dalam HIR/RBg juga tidak diatur mengenai tata cara melaksanakan sita marital.

Di dalam praktek ditemukan cara melaksanakan sita marital ternyata sama dengan melaksanakan sita jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199 HIR sedangkan diketahui fungsi sita marital adalah hanya untuk melindungi, menyimpan, membekukan harta bersama perkawinan agar tidak berpindah tangan. Fungsinya bukan sebagai jaminan pemenuhan suatu hak. Jadi fungsi sita marital tidak sama dengan fungsi sita jaminan pada umumnya. Oleh karena itu menurut teori hukum sebenarnya apabila sita marital itu dikabulkan, tidak perlu dinyatakan dengan kalimat sah dan berharga sebab apabila sita marital itu dinyatakan sah dan berharga maka bila pokok perkaranya berkekuatan hukum tetap sita tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial. Sehingga dapat dilakukan pelelangan dan dilakukan pengosongan.<sup>32</sup>

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 tahun 1975 dalam Pasal 24, ayat (2) huruf c ditentukan bahwa : selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri.

Pada ketentuan tersebut, tidak ditemukan dengan jelas kalimat sita marital, tetapi mengandung maksud adanya jaminan terhadap barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri (jaminan terhadap harta bersama).

Kemudian dalam praktek Peradilan Umum, apa yang disebutkan dalam Pasal

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Tigor Manulang, SH, M.H, tanggal 12 Januari 2009, Pukul 10.00 WIB

24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975, disebut dengan istilah sita harta bersama atau sita harta perkawinan.

Dalam praktek peradilan yang telah diketemukan pada perkara perdata No.199/pdt.G/PN/SMG tata cara dan prosedur pelaksanaan sita marital ternyata sama dengan pelaksanaan sita jaminan yang diatur dalam Pasal 197, 198 & 227 HIR/Pasal 208, 213, 214 RBg, yaitu dengan tahapan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan sita marital memerintahkan panitera, sekretaris PN untuk menunjuk juru sita/penggantinya untuk melaksanakan sita marital atas barang-barang harta perkawinan (contoh lampiran terlampir);
2. Panitera melalui juru sita memberitahukan kepada para pihak dan Kepala Desa setempat (Kepala Desa tempat barang-barang yang akan disita akan dilangsungkan penyitaan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditetapkan serta memerintahkan agar para pihak dan Kepala Desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan tersebut (contoh surat pemberitahuan terlampir);
3. Selanjutnya dilaksanakan penyitaan dilakukan oleh panitera dibantu oleh 2 orang saksi dengan membawa surat tugas (contoh surat tugas terlampir);
4. Pelaksanaan penyitaan sita marital dibuatkan berita acara yaitu berita acara sita marital. Panitera (juru sita) disaksikan 2 orang saksi mencatat barang-barang yang telah ditetapkan untuk disita. Berita acara tersebut

ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi (contoh berita acara terlampir);

5. Setelah dilaksanakan penyitaan yang dicatat dalam berita acara sita marital maka panitera (juru sita) melaporkan hasil penyitaan tersebut kepada :

- a) Kepada pihak tersita dan Kepala Desa setempat kemudian memberitahukan pemeliharaan terhadap barang-barang yang disita tetapi berada di tangan pihak tersita;
- b) Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dengan menyerahkan berita acara sitanya;

6. Selanjutnya penyitaan tersebut selain dilaporkan pada Majelis Hakim dicatatkan dalam buku register penyitaan yang ada di Pengadilan. Sedangkan mengenai penyitaan terhadap barang-barang tak bergerak hasil penyitaannya didaftarkan/dilaporkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk dicatat dalam register yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Dalam perkara No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG ditemukan bahwa amar putusannya dikatakan sita marital tersebut dinyatakan dengan kalimat sah dan berharga. Oleh karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap hingga saat ini sita marital tersebut tidak juga berubah menjadi sita eksekutorial terlepas apakah para pihak bisa melaksanakan pembagian harta bersama/tidak. Oleh karena itu berdasarkan temuan masalah sita marital yang terjadi dalam praktek ternyata pelaksanaan sita marital tersebut masih menggunakan cara-

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Setyubudi Tejocahyono, SH, M.Hum, tanggal 2 Februari 2009, Pukul 09.30 WIB

cara pelaksanaan sita jaminan pada umumnya berdasarkan Pasal 197, 198, 199 HIR. Sedangkan tata cara pelaksanaan sita marital itu sendiri terdapat ketentuan yang mengatur di dalam Rv bahkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 tidak mengatur cara melaksanakan sita hanya menyebutkan ada suatu sita marital yang diatur dalam 1 pasal yaitu Pasal 24 (2) huruf c. Oleh karena itu perlu adanya suatu ketentuan/peraturan-peraturan hukum acara perdata khususnya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan sita marital sampai dengan pelaksanaan eksekusi sita maritalnya.

Hal ini dapat dilihat dalam perkara No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG bahwa terdapat barang-barang harta perkawinan yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang penyalutannya meminta bantuan pada Pengadilan Negeri di wilayah barang perkara tersebut berada untuk melakukan penyalutan (contoh terlampir).

Sita marital atau sita harta bersama atau sita harta perkawinan, hanya ditentukan dalam 1 (satu) pasal saja yang terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974. Sedangkan mengenai cara melaksanakan sita marital/prosedur tata cara pelaksanaan sita marital itu banyak diatur di dalam RV (Reglement of De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63) sedangkan sita marital itu sendiri tidak diatur dalam ketentuan HIR/RBg

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan telah diperoleh data dan informasi mengenai sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG), maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut mengenai :

3. Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, adapun tahapannya adalah sebagai berikut :
  - a. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan berisi mengabulkan permohonan sita marital, memerintahkan panitera, sekretaris Pengadilan Negeri untuk menunjuk juru sita/penggantinya untuk melaksanakan sita marital atas barang-barang harta perkawinan (contoh penetapan terlampir);
  - b. Panitera melalui juru sita memberitahukan kepada para pihak dan Kepala Desa setempat (Kepala Desa tempat barang-barang yang akan disita akan dilangsungkan penyitaan)pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditetapkan serta memerintahkan agar para pihak dan Kepala Desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan tersebut (contoh surat pemberitahuan terlampir);

- c. Selanjutnya dilaksanakan penyitaan dilakukan oleh panitera dibantu oleh 2 orang saksi dengan membawa surat tugas (contoh surat tugas terlampir);
  - d. Pelaksanaan penyitaan sita marital dibuatkan berita acara yaitu berita acara sita marital. Panitera (juru sita) disaksikan 2 orang saksi mencatat barang-barang yang telah ditetapkan untuk disita. Berita acara tersebut ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi (contoh berita acara terlampir);
  - e. Setelah dilaksanakan penyitaan yang dicatat dalam berita acara sita marital maka panitera (juru sita) melaporkan hasil penyitaan tersebut kepada :
    - Kepada pihak tersita dan Kepala Desa setempat kemudian memberitahukan pemeliharaan terhadap barang-barang yang disita tetapi berada di tangan pihak tersita;
    - Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dengan menyerahkan berita acara sitanya;
  - f. Selanjutnya penyitaan tersebut selain dilaporkan pada Majelis Hakim dicatatkan dalam buku register penyitaan yang ada di Pengadilan, sedangkan mengenai penyitaan terhadap barang-barang tak bergerak hasil penyitaannya didaftarkan/dilaporkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Sita marital yang telah dikabulkan dalam gugatan perceraian yang dalam amar putusannya dinyatakan sah dan berharga dalam putusan



No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan pembagian harta bersamanya oleh para pihak, apakah sita marital yang dinyatakan sah dan berharga tersebut bisa ditingkatkan menjadi sita eksekutorial (karena dinyatakan sah dan berharga), seperti diketahui di dalam praktek yang terdapat dalam putusan perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, tentang gugatan perceraian disertai permohonan sita marital dalam gugatan itu dikabulkan, maka dalam amar putusannya sita marital tersebut dinyatakan sah dan berharga. Hal ini sesuai dengan praktek peradilan dalam perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga amar putusan yang menyatakan sita maritalnya sah dan berharga, tentu akan meningkat menjadi sita eksekusi (sita eksekusi yang tidak secara langsung). Pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial, akan tetapi hal tersebut sangat bertentangan dengan sifat sita marital itu sendiri yaitu hanya membekukan barang-barang yang disita, hingga sampai ada putusan pembagian harta bersama, dan telah dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut, namun kenyataan yang ada dalam praktek, untuk perkara No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) tidak juga dimohonkan eksekusi oleh pihak-pihak yang berperkara.

## **B. Saran**

Meskipun terdapat Undang-undang Perkawinan, akan tetapi peraturan yang mengatur tentang sita marital, terhadap harta bersama dalam perkara perceraian atau pembagian harta bersama hanya diatur dalam satu (1) pasal saja yaitu pasal 24 ayat (2) huruf C PP No.9 tahun 1975, hal inipun tidak menyebutkan secara jelas dengan kalimat sita marital, dan tidak pula mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan sita marital yang dikabulkan dalam perkara perceraian/pembagian harta bersama dalam prakteknya prosedur/tata cara melaksanakan sita marital berpedoman dengan cara penyitaan pada sita-sita umumnya yang diatur dalam HIR/ RBg. Oleh karena itu lembaga sita marital hanya diatur dalam (1) satu pasal saja yaitu dalam pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan tidak pula diatur dalam HIR/RBg, maka perlu adanya ketentuan Hukum Acara Perdata yang mengatur secara khusus tentang masalah sita marital yang selama ini berpedoman pada Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63) yang masih dipergunakan dalam praktek.

Perlu adanya kepastian hukum, apakah penyitaan yang dilakukan dalam sita marital yang dikabulkan dalam putusan dinyatakan sah dan berharga/tidak, sebab apabila dinyatakan sah dan berharga terhadap sita marital tersebut, maka akan ditingkatkan menjadi sita eksekutorial, sedangkan sita marital hanya bersifat untuk menyimpan atau membekukan harta bersama yang disengketakan, sehingga berakhirnya sita marital cukup

dengan mengabulkan gugatan perceraian atau dikabulkannya pembagian harta bersama, yang kemudian berdasarkan putusan tersebut telah dilaksanakan pembagian harta bersamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, 1996.
- Djamil, H,M, Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Harahap, Yahya, M, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- Kansil, C.S.T dan Christin S.T. Kansil, *Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdoharyo, Bandung, 1986
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarason, Yogyakarta, 1999.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, 1995.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan di Malaysia*, Fakultas Undang-undang University Malaya, 1977.

\_\_\_\_\_, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.

Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, BW Indonesia, BW Belanda lama dan BW baru*, Academika, Jakarta, 1976.

Saidus, Sjahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1976.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

S,A, Hakim, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-undang Tentang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, 1983.

Sevilla, Consuelo, C, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1993.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990.

\_\_\_\_\_, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1990.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Subekti, R, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Syahrani, Riduan, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Suyuthi, Wildan, *Sita Dan Eksekusi*, Tatanusa, 2004.

Vollmar, *Hukum Keluarga*, Tarsito, Bandung, 1990.

Wibowo, Reksopradoto, *Hukum Perkawinan tentang Perkawinan*, Itikad baik, Semarang, 1985.

## **B. Perundang-undangan**

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Petunjuk Mahkamah Agung Nomor M.A/PEMB/0807 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
6. Reglemen Acara Perdata/Rv (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63).
7. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama